

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu mengukur kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, maka perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

- Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2026 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

Nama Unit Organisasi : KPU Kabupaten Kudus

Tahun Anggaran : 2026

Tugas KPU Kabupaten Kudus :

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kudus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah serta anggota DPRD kabupaten Kudus pada Kabupaten Kudus serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kudus, dan KPU Provinsi Jawa Tengah;

8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten Kudus terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten Kudus serta calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus terpilih dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kudus kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi KPU Kabupaten Kudus:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kudus;
2. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Kudus;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Kudus dan Sekretariat KPU Kabupaten Kudus;
4. Fasilitasi penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kudus;
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
6. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Kudus; dan
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Kudus.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum					
I. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan					
1	Terlaksananya pengelolaan, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten sesuai ketentuan	Persentase pengelolaan Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat	Pengelolaan eks logistik dan arsip Pemilu dan Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang sesuai ketentuan dan tepat waktu}}{\text{Total kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang direncanakan}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
		Persentase penyusunan dan penyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan secara lengkap, akurat, dan	Penyusunan laporan pengelolaan eks logistik dan arsip Pemilu dan Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang sesuai ketentuan dan tepat waktu}}{\text{Total kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang direncanakan}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan Umum dan Logistik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
		tepat waktu.			
II. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan					
2	Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat kabupaten secara tepat, cepat, dan akurat.	Jumlah penyajian informasi produk hukum KPU Kabupaten Kudus secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	Pengunggahan, pengklasifikasian, dan pemutakhiran Keputusan KPU serta regulasi lainnya pada website JDIH KPU Kabupaten Kudus	(Menghitung jumlah penyajian informasi produk hukum yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan akurat sampai pada unggah di Website JDIH KPU Kabupaten Kudus)	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum
3	Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum yang diterima.	Persentase mengikuti penyuluhan hukum Peraturan KPU dengan baik.	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bedah PKPU, dan penyuluhan hukum	$\frac{\text{Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan hukum dengan baik}}{\text{Total peserta yang mengikuti penyuluhan hukum}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
4	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan regulasi KPU di tingkat kabupaten/kota secara patuh hukum dan akuntabel.	Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum.	Pemberian legal drafting (telaah hukum), pendampingan penyusunan Keputusan, dan penyiapan alat bukti jika terjadi sengketa	$\frac{\text{Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan hukum dengan baik}}{\text{Total peserta yang mengikuti penyuluhan hukum}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
III. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih					
1	Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten Kudus dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	Penjajakan kemitraan strategis, pembahasan rancangan draf, dan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU/PKS) antar lembaga.	Menghitung jumlah lembaga yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU/PKS atau dokumen resmi lain) dengan KPU Kabupaten/Kota pada periode berjalan	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
	Pemilihan di tingkat kabupaten.				
2	Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten Kudus secara cepat, akurat, dan tepat.	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten Kudus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pengelolaan layanan desk informasi, registrasi pemohon, pemenuhan permohonan informasi, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) PPID.	$\frac{\text{Jumlah permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Total permohonan informasi dan data yang diterima}} \times 100\%$	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
3	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat Kabupaten Kudus melalui media yang tersedia	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.	Pembuatan konten infografis/videografis kepemiluan, penulisan press release, dan pembaruan informasi di website serta media sosial KPU	$\frac{\text{Jumlah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia}}{\text{Total kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang direncanakan}} \times 100\%$	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.
IV. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan					
1	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi	Persentase fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang	Penerimaan dokumen usulan PAW dari DPRD, verifikasi keabsahan syarat calon PAW, dan penyusunan kronologi perolehan suara	$\frac{\text{Jumlah Berkas PAW selesai sesuai ketentuan}}{\text{Total Permintaan PAW yang diterima}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
	penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	berlaku oleh KPU			
2	Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.	Persentase permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Kudus yang ditindaklanjuti dan disampaikan kepada KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.	Penyelenggaraan Rapat Pleno penetapan PAW, penyusunan Berita Acara, dan pengiriman Surat Keputusan PAW ke Gubernur via Bupati	$\frac{\text{Jumlah PAW tepat waktu dan sesuai ketentuan}}{\text{Total Permohonan PAW yang diterima}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3	Terlaksananya penyusunan Daerah	Persentase penyusunan Daerah	Pengolahan Data Agregat Kependudukan		Subbagian Teknis

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
	Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.	Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten Kudus sesuai ketentuan yang berlaku.	per Kecamatan (DAK2), penyusunan draf rancangan penataan Dapil, dan pelaksanaan Uji Publik Dapil	$\frac{\text{Jumlah Dapil DPRD Kabupaten yang disusun sesuai ketentuan}}{\text{Total Dapil DPRD Kabupaten yang wajib disusun}} \times 100\%$	Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
V. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
1	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat Kabupaten.	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.	Pelaksanaan siniar/podcast, sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi melalui media sosial	Menghitung jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kelompok sasaran (Pemula, Rentan, Marginal) yang dilakukan KPU Kabupaten.	Pelaksanaan siniar/podcast, sosialisasi bagi kelompok rentan/disabilitas/marginal dan penyebaran bahan sosialisasi melalui media sosial	Menghitung Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kelompok sasaran (Pemula, Rentan, Marginal) yang dilakukan KPU Kabupaten.	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.
B. Program Dukungan Manajemen					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
I. Pengelolaan Keuangan					
1	Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten Kudus dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten Kudus mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	Fasilitasi pengusulan sertifikasi bendahara atau pengikutsertaan pejabat perbendaharaan dalam Bimtek terkait akuntansi dan perpajakan	$\frac{\text{Jumlah pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten yang menyelesaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan}}{\text{Total pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.
2	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Kudus yang disusun dan disampaikan sesuai	Penginputan jurnal transaksi harian, rekonsiliasi data, dan penyusunan Laporan Keuangan Semester/Tahunan	Menghitung jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode berjalan	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
	KPU Kabupaten sesuai ketentuan.	ketentuan.	pada aplikasi SAKTI.		
3	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	Jumlah laporan PIPK KPU Kabupaten Kudus yang disusun sesuai ketentuan	Pelaksanaan pengujian efektivitas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) tingkat entitas akuntansi dan penyusunan laporannya	Menghitung jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan (PIPK) KPU Kabupaten yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada periode berjalan	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
4	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU	Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten Kudus	Pelaksanaan/keikutsertaan bimbingan teknis (Bimtek) operasional aplikasi SAKTI modul pelaporan dan penganggaran	$\frac{\text{Jumlah operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten yang kompetensinya tersertifikasi}}{\text{Total operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.
5	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU	Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR KPU Kabupaten Kudus	Pencatatan, pemutakhiran data, dan penagihan piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	$\frac{\text{Jumlah piutang TP atau TGR KPU Kabupaten yang ditatausahakan dan direkap sesuai ketentuan}}{\text{Total piutang TP atau TGR KPU Kabupaten}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
6	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten sesuai ketentuan.	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	Verifikasi dokumen SPJ Bendahara dan penyusunan serta penyampaian LPJ bulanan secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah KPU Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu}}{\text{Total KPU Kabupaten yang wajib menyampaikan laporan}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.
7	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Kudus secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	Pemrosesan daftar gaji, verifikasi absensi/tunjangan kinerja, dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji ke KPPN	$\frac{\text{Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Total pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang wajib dilakukan}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
II. Manajemen Perencanaan dan Organisasi					
1	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten yang sesuai ketentuan perencanaan.	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.	Penyusunan usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA-K/L), telaah kebutuhan anggaran, dan pemrosesan usulan revisi POK/DIPA	$\frac{\text{Jumlah perencanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten yang disusun sesuai ketentuan}}{\text{Total perencanaan program dan kegiatan yang wajib disusun}} \times 100\%$	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
2	Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten	Jumlah lembaga di tingkat Kabupaten Kudus yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten Kudus dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan.	Penjajakan kemitraan strategis, pembahasan rancangan draf, dan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU/PKS) antar lembaga	Menghitung jumlah lembaga di tingkat kabupaten yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU, PKS, atau bentuk kesepakatan resmi lainnya) dengan KPU Kabupaten pada periode berjalan	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
3	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten sesuai pedoman yang berlaku.	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kudus sesuai pedoman KPU.	Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), pemenuhan data dukung 8 Area Perubahan, dan evaluasi capaian ZI	$\frac{\text{Jumlah komponen Reformasi Birokrasi yang dipenuhi oleh KPU Kabupaten}}{\text{Total komponen Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam pedoman KPU}} \times 100\%$	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
4	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan Kabupaten.	Persentase pelayanan publik secara baik.	Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), peninjauan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan, dan evaluasi hasil pelayanan publik (PEKPPP)	$\frac{\text{Jumlah layanan publik KPU Kabupaten yang memenuhi standar pelayanan publik}}{\text{Total layanan publik yang diberikan}} \times 100\%$	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Kudus secara akuntabel dan tepat waktu.	Pengumpulan data capaian kinerja, penginputan realisasi ke aplikasi e-Monev Bappenas & SMART Kemenkeu, serta penyusunan laporan Monev	Menghitung jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten serta disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan pada periode berjalan	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
III. Pengelolaan Sumber Daya Manusia					
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang	Persentase pegawai di KPU Kabupaten Kudus yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.	Pemrosesan usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usulan kenaikan pangkat, pengelolaan cuti, mutasi, pensiun, dan pemutakhiran data	$\frac{\text{Jumlah pegawai KPU Kabupaten yang menerima layanan administrasi kepegawaian tepat waktu}}{\text{Total pegawai KPU Kabupaten yang mengajukan layanan administrasi kepegawaian}} \times 100\%$	Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
	tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten.		SIMPEG		
IV. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana					
1	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten Kudus yang baik dan memadai.	Pengecekan, pemeliharaan, perbaikan inventaris kantor (PC, Printer, AC), dan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	$\frac{\text{Jumlah sarana kerja KPU Kabupaten yang memenuhi standar kelayaka dan fungsi}}{\text{Total sarana kerja KPU Kabupaten yang tersedia}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja melalui pembangunan dan/atau renovasi gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten yang tepat waktu dan berdaya manfaat.	Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten Kudus yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai.	Perawatan fisik bangunan rutin, pelayanan kebersihan, dan pembayaran daya/jasa (listrik, air, internet).	$\frac{\text{Jumlah gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten yang dibangun atau direnovasi tepat waktu serta memenuhi standar kelayakan dan fungsi}}{\text{Total gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten yang dibangun atau direnovasi}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.
3	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten Kudus yang memenuhi kebutuhan kerja.	Pengecekan, pemeliharaan, perbaikan inventaris kantor (PC, Printer, AC), dan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkantoran KPU Kabupaten yang memenuhi standar kebutuhan kerja}}{\text{Total layanan perkantoran KPU Kabupaten yang diselenggarakan}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
4	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten.	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Kudus.	Penerimaan, pencatatan surat masuk/keluar, pelabelan boks arsip, dan penataan arsip inaktif	$\frac{\text{Jumlah aspek tata kelola persuratan dan pengelolaan arsip yang memenuhi standar}}{\text{Total aspek tata kelola persuratan dan pengelolaan arsip yang dinilai}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.
5	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten.	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Kudus	Penyiapan kelengkapan ruang rapat (proyektor, sound system, konsumsi), layout ruangan, dan fasilitasi keprotokolan pimpinan	$\frac{\text{Jumlah aspek layanan persidangan dan protokol yang memenuhi standar pelayanan}}{\text{Total aspek layanan persidangan dan protokol yang dinilai}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.
6	Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten Kudus	Penjagaan keamanan kantor 1x24 jam (Jagat Saksana), patroli lingkungan rutin, dan pengelolaan akses buku	$\frac{\text{Jumlah aspek layanan keamanan dan ketertiban yang memenuhi standar pelayanan}}{\text{Total aspek layanan keamanan dan ketertiban yang dinilai}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
	bagi Pegawai KPU Kabupaten.		tamu		
7	Terlaksananya fasilitasi kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten secara memadai.	Persentase kualitas layanan terhadap fasilitasi kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten Kudus.	Penyediaan sarana Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan fasilitasi layanan kesehatan/BPJS pegawai	$\frac{\text{Jumlah aspek layanan fasilitasi kesehatan pegawai yang memenuhi standar pelayanan}}{\text{Total aspek layanan fasilitasi kesehatan yang dinilai}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.
V. Pemeriksaan Internal KPU					
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Kabupaten	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Kabupaten Kudus yang ditindaklanjuti	Pengelolaan kanal aduan publik (WADUL KPU), verifikasi bukti laporan dugaan pelanggaran, dan penyusunan telaah tindak lanjut	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Total pengaduan masyarakat yang diterima KPU Kabupaten}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten Kudus yang ditindaklanjuti	Pengumpulan bukti dukung Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), pengisian matriks tindak lanjut, dan pelaporan ke Inspektorat KPU	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang telah ditindak lanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Total rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang diterima KPU Kabupaten}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten	Persentase penyampaian laporan keuangan KPU Kabupaten Kudus yang disusun sesuai SAP dan bebas dari kesalahan material	Pelaksanaan reviu kepatuhan pendampingan internal terkait penyusunan dokumen pertanggungjawaban bebas temuan administrasi	$\frac{\text{Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan dinyatakan bebas dari kesalahan material}}{\text{Total laporan keuangan KPU Kabupaten yang wajib disusun}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
4	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Kudus.	Pelaksanaan Self-Assessment SPIP, penyusunan dokumen pemetaan risiko (Risk Register), dan penyusunan laporan Maturitas SPIP bulanan	Penilaian tingkat maturitas SPIP KPU Kabupaten berdasarkan pedoman penilaian SPIP yang ditetapkan BPKP, mencakup unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
VI. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara					
1	Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa di KPU Kabupaten Kudus secara tertib dan akuntabel	Persentase pengadaan Barang/Jasa terdapat kasus pada proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau	Penyusunan RUP, pemrosesan pengadaan barang/jasa via e-Katalog/LPSE sesuai spesifikasi teknis untuk mencegah temuan	$\frac{\text{Jumlah paket pengadaan Barang atau Jasa Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan tanpa temuan kasus kerugian negara}}{\text{Total paket pengadaan Barang atau Jasa Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
		pemborosan uang negara			
2	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Kudus yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Pendataan aset Barang Milik Negara (BMN), pelabelan identitas barang, dan pengusulan penghapusan BMN rusak berat.	$\frac{\text{Jumlah BMN material KPU Kabupaten yang dikelola sesuai ketentuan SAP dan kebijakan BMN}}{\text{Total BMN material KPU Kabupaten yang wajib dikelola}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
3	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Kudus berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi	Penginputan data aset ke aplikasi SIMAK BMN / SAKTI modul aset, rekonsiliasi internal, dan penyusunan laporan aset rutin	Menghitung jumlah laporan BMN KPU Kabupaten yang disusun melalui SIMAK BMN/SAKTI Modul Aset, direkonsiliasi, dan dinyatakan sesuai dengan data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada periode pelaporan	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
		Keuangan (SAK)			
VII. Pengelolaan Data dan Informasi					
1	Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase penyediaan data dan informasi pemilih yang mutakhir	Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih, sinkronisasi data kependudukan, dan rekapitulasi pergerakan data di aplikasi Sidalih	$\frac{\text{Jumlah Data Terupdate}}{\text{Total DPT Terakhir/Target}} \times 100\%$	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
2	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU	Pemeliharaan server lokal, perbaikan troubleshooting jaringan internet (LAN/Wi-Fi), dan perawatan perangkat keras (PC/Laptop)	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten yang tersedia, berfungsi, dan terintegrasi sesuai standar KPU}}{\text{Total sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten yang dibutuhkan sesuai standar KPU}} \times 100\%$	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
VIII. Pengembangan Sumber Daya Manusia					
1	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten Kudus melalui media kompetensi yang tersedia	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada	Fasilitasi pendaftaran dan keikutsertaan pegawai dalam webinar, diklat teknis, atau pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan KPU/Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah pegawai KPU Kabupaten yang mengikuti dan menyelesaikan kegiatan peningkatan kompetensi melalui media yang tersedia}}{\text{Total pegawai KPU Kabupaten yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi}} \times 100\%$	Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
		Persentase pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kudus yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun	Perekapan sertifikat diklat/webinar pegawai, pemantauan riwayat pelatihan di SIASN/SIMPEG, dan penghitungan konversi Jam Pelajaran (JP)	$\frac{\text{Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang memenuhi minimal jam pelajaran pengembangan kompetensi sesuai ketentuan}}{\text{Total pegawai Sekretariat KPU Kabupaten}} \times 100\%$	Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
		berfungsi dengan baik			
IX. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu					
1	Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten	Persentase penggunaan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan KPU Kabupaten Kudus sesuai ketentuan	Pengoperasian, pengawasan, input data harian, dan pemeliharaan database pada aplikasi KPU (Sidalih, Sipol, SimPAW, Simpel dll)	$\frac{\text{Jumlah sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan sesuai ketentuan}}{\text{Total sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang wajib dioperasikan di KPU Kabupaten}} \times 100\%$	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
X. Pendataan DPT Berkelanjutan					
1	Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat Kabupaten. berwibawa (clean governance)	Persentase pelaksanaan persiapan pendataan DPT berkelanjutan	Pelaksanaan rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan verifikasi elemen data	$\frac{\text{Jumlah komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan}}{\text{Total komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang ditetapkan}} \times 100\%$	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
2	Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat Kabupaten bersama pihak terkait.	Persentase pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait	Sinkronisasi data pemilih (meninggal/pindah domisili/TNI/Polri) dengan pihak terkait dan rekapitulasi PDPB secara periodik	$\frac{\text{Jumlah pendataan DPT berkelanjutan terbaru}}{\text{DPT berkelanjutan awal}} \times 100\%$	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ayhu Ngabekti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL